



## **PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN: ANALISIS PENDEKATAN MAQASID SYARIAH**

**Ayumiati<sup>1</sup>, Nasir Aziz<sup>2</sup>, Heru Pahlevi<sup>3</sup>, Muhammad Yasir Yusuf<sup>4</sup>, Syukri Abdullah<sup>5</sup>.**

<sup>1,3</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry, Banda Aceh, Indonesia*

<sup>2,4,5</sup> *Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia*

Email Kontributor: ayumiati@ar-raniry.ac.id

### **Abstrak**

*Education is the main key in improving human resources and the prosperity of a country or region. For this reason, the government plays a role and is responsible for providing education in order to improve the quality of public education. The purpose of this study was to analyze the budget for the education sector using the maqasid sharia concept. This research was conducted in Bener Meriah district, with the source of data used in the form of secondary data, namely financial report data on the realization of the Bener Meriah district government in the education sector. By analyzing data using descriptive qualitative methods by collecting data, then compiling and managing and analyzing data to describe certain circumstances. The results of this study indicate that the budget allocation for education in Bener Meriah district in its application has not fully dominated the dharuriah concept using five indicators. However, the budget allocation is more focused on: firstly protecting descendants, secondly protecting religion, thirdly protecting reason, while protecting life and property is not prioritized.*

*Kata Kunci: Regional Revenue and Expenditure Budget, Education Budget, Maqasid Syariah*

### **A. Introduction**

Pendidikan salah satu tanggungjawab yang di bebankan kepada perintah. Ini merupakan kewajiban negara untuk mewajibkan alokasi sumberdaya anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sumberdaya ini diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu sebanyak 20 persen untuk pengelolaan pendidikan. UUD 1945 merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun Daerah disebabkan dalam menetapkan APBD dengan Perda dievaluasi terlebih dahulu oleh Menteri. Untuk Pengalokasian anggaran pendidikan ini tidaklah mudah menginggit terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh daerah (Fahlevi, et al, 2018). Apalagi tingginya kepentingan politik (Abdullah, 2012a). Sehingga karakteristik suatu daerah dapat menyebabkan penggunaan alokasi anggaran juga berbeda-beda, begitupun dengan daerah yang memerlukan anggaran sebanyak 20 persen (Indah, et al, 2017).

Pembangunan bidang pendidikan dapat meningkatkan ekonomi suatu negara (Jalil dan Idrees, 2013), serta mampu memenuhi kualitas sumber daya manusia (Jabbar dan Selvaratnam, 2017). Banyaknya kasus penyalahan anggaran yang salah satunya adalah terkait dengan penyalahgunaan penyaluran anggaran beasiswa menjadi masalah di tingkat pemerintahan. persoalan terkait dengan anggaran pendidikan salah satunya adalah kasus korupsi anggaran pendidikan menunjukkan bahwa reputasi daerah menurun. Kasus tersebut merupakan terkait dengan korupsi anggaran bidang pendidikan di Aceh menjadi sorotan publik. Selain itu dalam APBD jelas bahwa anggaran pendidikan merupakan belanja yang tidak langsung.

Aceh merupakan provinsi yang menerapkan prinsip syariah maka dari itu pengelolaan pendidikan juga di atur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008, yang menjelaskan bagaimana pendidikan dikelola dan diselenggarakan serta pengalokasian dana pendidikan. Untuk itu dalam merencanakan anggaran yang tidak tepat dapat menyulitkan dalam pembahasan anggaran. Maka dari itu perlu adanya konsep pendistribusian anggaran dengan menggunakan konsep Maqasid Syariah yang didalamnya terdapat tiga pilar yaitu Dharuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat. Dharuriyat ini terbagi dalam lima indikator yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Rahmawati, 2012) menjelaskan beberapa dari ulama kontemporer menyatakan dalam pengalokasian anggaran di butuhkan konsep anggaran. Sedangkan (Muftukhatussolihah, 2015) pengelolaan anggaran yang menggunakan pendekatan Maqasid Syariah harus di tentukan dengan kebutuhan masyarakat yang ada dalam maqasid syariah dharuriyah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana alokasi anggaran bidang pendidikan apakah sudah mencerminkan pada konsep maqasid syariah yaitu dharuriyat.

## **B. Method**

Penelitian ini menggunakan kualitatif merupakan berupa data yang tertulis, peristiwa dan lain sebagainya dan bersifat deskriptif. Yin (2009) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif dapat melihat terkait dengan organisasi, sosial dan lain sebagainya. Pendekatan ini lebih ke tingkat sektoral (Fuadi dalam Salam, 2012) dengan cara melihat pada sektoral. dengan pendekatan sektoral dimana menganalisis anggaran pada pemerintah daerah, jumlah anggaran serta melihat mana yang lebih di perioritaskan.. Sumber data diperoleh dari data primer serta skunder. Data primer ini di peroleh dari wawancara pada pemerintah daerah Bener meriah yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan data skunder terdiri dari laporan keuangan pemerintah daerah Bener Meriah. Teknik Analisis data dengan menggunakan purposive sampling. Dimana penelitian ini berhubungan dengan realisasi anggaran APBD bidang pendidikan dan haanya melihat pada tingkat APBD berdasarkan fungsinya dan di analisis dengan pendekatan Maqasid Syariah.

## **C. Finding discution**

Tabel 1. Realisasi APBD Kabupaten Bener Meriah Periode Tahun 2018

URAIAN	APBD	REALISASI	%
PENDAPATAN	937.876.460.817,00	878.692.257.195,54	93,69%
Pendapatan Asli Daerah	122.978.606.703,00	67.961.546.854,57	55,26
Pendapatan Pajak Daerah	6.394.000.000,00	4.167.625.598,00	65,18
Pendapatan Retribusi Daerah	9.652.232.000,00	3.730.391.545,00	38,65
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.498.576.559	99,97
Lain-lain PAD yang Sah	92.432.374.703	47.012.930.353,07	50,86
Zakat dan Infak	10.000.000.000	8.552.022.799,50	85,52
PENDAPATAN TRANSFER	814.897.854.114	793.578.226.740,97	97,38
Tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA	588.638.966.128	580.388.983.190	98,60
Dana Bagi Hasil Pajak	12.481.718.922	10.110.368.491	81,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)	5.232.537.206	3.545.478.574	67,76
Dana Alokasi Umum	448.988.545.000	448.988.545.000	100
Dana alokasi Khusus	121.936.165.000	117.744.591.125	96,56
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	192.768.837.000	192.810.749.000	100
Dana Penyesuaian	192.768.837.000	192.810.749.000	100,02
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	33.90.050.986	20.378.494.550,97	60,85
BELANJA	733.866.709.861,87	674.544.378.866,00	91,92
BELANJA OPERASI	550.395.106.120,87	506.792.051.626,00	92,08
Belanja Pegawai	318.573.642.650,87	311.091.146.089,00	97,65
Belanja Barang dan Jasa	215.441.063.470,00	179.602.005.537,00	83,36
Belanja Subsidi	300.000.000	300.000.000	100,00
Belanja Hibah	5.605.400.000,00	5.339.900.000,00	95,26
Belanja Bantuan Sosial	10.475.000.000	10.459.000.000	99,85
BELANJA MODAL	180.221.603.741,00	164.511.557.740,00	91,28
Belanja Modal Tanah	19.226.397.019,00	18.584.872.987,00	96,66
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.051.898.132,00	27.579.658.770	88,82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.585.021.469	36.438.620.802	87,62
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.963.134.334	79.641.020.894	92,65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.395.152.787,00	2.267.384.287,00	94,67
BELANJA TAK TERDUGA	3.250.000.000,00	3.240.769.500,00	99,72
Belanja Tak Terduga	3.250.000.000,00	3.240.769.500,00	99,72
TRANSFER	206.554.345.280	205.026.169.543,44	99,26
Tranfer bagi hasil	1.604.623.200	154.038.223,44	9,48
Pendapatan			
Transfer bagi hasil Pajak daerah	639.400.000	75.975.824	11,88
Transfer bagi hasil pendapatan lainnya	965.223.200	76.062.399	7,88

Tranfer Bantuan Keuangan	204.949.722.080	204.874.131.320	99,96
Tranfer Bantuan Keuangan Ke Desa	204.659.784.600	204.613.884.600	99,98
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	289.937.480	260.246.720	89,76
Surplus/ (Defisit)	2.544.594.324,87	878.291.213,90	34,52
Penerimaan Pembiayaan	2.544.594.324,87	2.542.886.938, 87	99,93%
Penggunaan SiLPA	2.544.594.324,87	2.542.886.938, 87	99,93%
Pembiayaan Netto	2.544.594.324,87	2.542.886.938,87	99, 93
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran	0,00	1.664.595.724,97	0

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Bener Meriah, 2018, diolah

Tabel 2. Realisasi Belanja SKPD Kabupaten Bener Meriah

URAIAN	REALISASI
Dinas Pendidikan	33.005.631.135,00
Dinas Kesehatan	27.465.937.557,00
Dinas Pekerjaan Umum	103.249.869.390,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	679.088.090,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	2.995.503.292,00
Dinas Sosial	1.435.829.416,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.060.002.590,00
Dinas Pertanahan Kabupaten	17.041.134.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.500.674.157,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.246.112.988,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.134.796025,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1.920.325.008,00
Dinas Perhubungan	2.792.665.659,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.760.949.318,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	767.370.024,00
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.108.317.107,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	722.348.419,00
Dinas Pariwisata	10.140.515.215,00
Dinas Pertanian dan Pangan	18.710.478.813,00
Dinas Perdagangan	2.048.856.068,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah	29.806.264.097,00
Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah	9.664.719.180,00
Dinas Syariat Islam	12.554.996.976,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.032.378.575,00
Dinas Pendidikan Dayah	2.106.260.755,00
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	729.545.125,00
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	781.661.810,00
Sekretariat Majelis Adat Aceh	492.028.911,00
Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	537.849.724,00

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	513.354.864,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah	2.060.635.807,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.609.520.632,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	10.259.477.941,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.727.374.047,00
Jumlah	326.662.473.115,00

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Bener Meriah, 2018, diolah

Untuk mengukur realisasi anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan maqasid syariah dalam konsep Dharuriyah maka menggunakan analisis domain. Kelima hal yang ada dalam dharuriyah tersebut menjadi dasar untuk menganalisis distribusi anggaran pemerintah kabupaten. Berikut ini dapat dilihat tabel hubungan semantik maqasid syariah dengan APBD:

Tabel 3. Alokasi APBD bidang pendidikan berdasarkan fungsi Maqasid Syariah

No	Domain	Alokasi Anggaran dalam APBD
1	Agama	Pembangunan sarana ibadah Peningkatan pada tatanan keamanan dalam pendidikan
2	Jiwa	Penyediaan beasiswa Peningkatan lingkungan yang sehat Peningkatan mutu pendidikan Pembinaan kelembagaan sekolah Pembinaan minat dan kreatifitas siswa Pengembangan kurikulum
3	Akal	Program pendidikan non formal Peningkatan mutu pendidikan Pengembangan pendidikan Program belajar 9 tahun
4	Keturunan	Fasilitas lingkungan yang baik Pengadaan perlengkapan sekolah
5	Harta	Pembangunan gedung dan fasilitas lainnya

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Tabel 4. Alokasi APBD Berdasarkan Maqasid Syariah pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 (Dalam Juta)

No	Maqasid Syariah	2018
1	Agama	8.014
2	Jiwa	980
3	Akal	-
4	Keturunan	16.538

5	Harta	-
---	-------	---

Sumber: Data diolah dari data Skunder Kabupaten Bener Meriah, 2018

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa: program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen pemeliharaan keturunan paling banyak alokasi anggarannya sehingga menduduki pada posissi paling utama. Program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa dengan total jumlah dana sebesar Rp16.635.400.000. ini berarti mecapai 40% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan keturunan. Agama. selanjutnya posisi no urut keduan yaitu merupakan penjagaan Agaman dengan total jumlah dana sebesar Rp8,014,947,761. ini berarti mecapai 94% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan Agama dapat tercapai realisasinya. Sedangkan untuk yang ketiga adalah komponen perlindungan Jiwa dengan total jumlah dana sebesar Rp980.685.000. ini berarti mecapai 60% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan Jiwa. Namun untuk pemeliharaan Akal dan Harta tidak ada pembiayaannya. Pada kabupaten Bener Meriah lebih terfokus pada penjagaan keturunan, seharusnya lebih memprioritaskan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan akal sesuai dengan urutan dalam Maqasid Syariah.

#### **D. Conclution**

Berdasarkan alokasi anggaran pendidikan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah lebih terfokus pada penjagaan keturunan, agama, akal sedangkan untuk penjagaan jiwa dan harta tidak di perioritaskan

#### **Reference**

- Abdullah, Syukriy. 2012a. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Disertasi (Tidak Dipublikasikan) Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Abdul Jabbar, N., & Selvaratnam, D. P. (2017). Analysis of the determinants of education expenditures in Malaysia. *Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship (JIBE)*, 2(1), 1-10.
- Fahlevi, Heru. 2018. Revenue Budget Variance and Capital Expenditure Realization Emperical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 9(1): 1-10.
- Indah, Dewi Rosa, Syukriy Abdullah, Heru Fahlevi, Rahmi Meutia, & Afrah Junita. 2017. Minimal Budget Allocation and Restricted Deficit Regulation: Local Governments' Compliance Assessment. ICSTMS Universitas Samudra (Unsam). Web: <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/icstms/article/view/496>.
- Jalil, Abdul & Muhammad Idrees. 2013. Modeling the Impact of Education on The

Economic Growth: Evidence from Aggregated and Disaggregated Time Series Data of Pakistan. *Economic Modelling* 31: 383–388

Maftukhatusolikhah, M. (2015). Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013). *Intizar*, 21(1), 23-36.

Undang-undang dasar 1945

Qanun Nomor 5 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Pendidikan

